PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JUDICIAL REVIEW

Yosephira Natania, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

yosephiranatania4@gmail.com

Nyoman Satyayudha Dananjaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

satyayudha@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i12.p1

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji perlindungan hukum hak milik atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran serta mengevaluasi mekanisme judicial review dalam menyelesaikan sengketa hak milik atas tanah. Metode yang dipergunakan yakni penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta analisis konseptual terhadap regulasi yang berlaku dan dampak judicial review terhadap kebijakan agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judicial review berperan penting dalam memperjuangkan hak konstitusional individu, terutama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan perjanjian pranikah dibuat setelah perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi WNI dalam perkawinan campuran dan mendorong reformasi hukum agraria yang lebih inklusif.

Kata Kunci: *Perkawinan Campuran, Hak Milik Atas Tanah, Perlindungan Hukum, Judicial Review.*

ABSTRACT

This study aims to examine the legal protection of land ownership for Indonesian citizens in mixed marriages and to evaluate the judicial review mechanism in resolving land ownership disputes. The method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual analysis of applicable regulations and the impact of judicial review on agrarian policies. The results of the study indicate that judicial review plays an important role in fighting for individual constitutional rights, especially through the Constitutional Court Decision which allows prenuptial agreements to be made after the marriage has taken place. This decision provides legal certainty for Indonesian citizens in mixed marriages and encourages more inclusive agrarian law reform.

Key Words: *Mixed Marriages, Land Ownership, Legal Protection, Judicial Review.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Tujuan utama pernikahan adalah membangun kehidupan rumah tangga yang didasari cinta, kasih sayang, serta keimanan kepada Tuhan, sehingga mencerminkan makna pernikahan sebagai

ikatan yang sakral dan bernilai luhur.¹ Perkawinan campuran atau perkawinan antarbangsa terjadi ketika suami dan istri berasal dari negara yang berbeda. Perkawinan campuran di Indonesia dimuat didalam pasal 57-62 UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Didalam perkawinan campuran, terkandung unsur-unsur yang harus terpenuhi, yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan tersebut diakui secara hukum di Indonesia;
2. Pernikahan yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda menyebabkan kedua belah pihak harus mengikuti aturan hukum yang tidak sama, khususnya jika salah satu pasangan adalah warga negara Indonesia.²

Permasalahan hukum kerap muncul didalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, terutama dalam hal kepemilikan tanah dan bangunan. Menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA), hanya WNI yang berhak atas kepemilikan tanah dalam kapasitas hak milik. WNA harus melepas hak atas tanahnya selama satu tahun sejak memperoleh tanah melalui warisan atau sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan campuran tanpa ada perjanjian pranikah, perihal tersebut juga diberlakukan untuk WNI yang sudah tidak mempunyai kewarganegaraannya.

Pasal 21 ayat (3) UUPA menetapkan bahwasanya “WNA tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menguasai tanah dengan kapasitas hak milik di Indonesia”. Sementara itu, Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwasanya “hanya WNI yang mempunyai hak atas kepemilikan tanah secara penuh”. Agar kepemilikan tanah tetap sah dalam perkawinan campuran, diperlukan kesepakatan tertulis atau perjanjian pranikah sebagaimana Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam perjanjian ini melingkupi beberapa aspek berikut:

1. Pasangan dapat membuat perjanjian tertulis sebelum atau saat menikah dengan persetujuan pencatat perkawinan.
2. Perjanjian tidak diperbolehkan untuk berlawanan dengan nilai-nilai agama, moralitas, atau peraturan hukum yang berlaku.
3. Perjanjian mulai berlaku begitu perkawinan berlangsung.
4. Setiap perubahan dalam perjanjian hanya sah jika disetujui oleh kedua pihak serta tidak merugikan pihak ketiga.

Persoalan serius seringkali muncul karena UU Perkawinan mengharuskan persetujuan kedua belah pihak dalam transaksi aset, termasuk tanah dan properti. Jika salah satu pasangan ialah WNA, kepemilikan tanah bisa batal demi hukum atau harus dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan masalah terkait pelanggaran hak konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan atas hak kepemilikan yang diakui dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Ike Farida adalah seorang WNI yang menikahi WNA, kisahnya menjadi percontohan yang relevan dalam perihal ini. Ia merasa status perkawinannya telah menghalangi hak konstitusionalnya untuk memiliki properti berupa Hak Milik (HM) serta hak Guna Bangunan (HGB), sehingga ia mengajukan permohonan uji materiil

¹ Yahya Harahap, “Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974” (Zahir Trading Co., 2015), 1.

² Sofianti Musa Robo, dkk., “Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional”, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, no. 1 (2021): 25-35.

terhadap ketentuan UUPA dan UUP. Kasus ini menunjukkan pentingnya adanya reformasi hukum agraria yang lebih inklusif, yang dapat memfasilitasi kepemilikan properti bagi semua pasangan, tanpa memandang status perkawinan mereka.

Permasalahan ini sangat relevan di tengah meningkatnya globalisasi serta mobilitas internasional, yang menyebabkan semakin banyaknya perkawinan campuran. Hukum agraria yang membatasi kepemilikan hak atas tanah hanya bagi WNI perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa regulasi tersebut tetap kontekstual dengan dinamika sosial dan hukum modern. Selain itu, kajian terhadap mekanisme *judicial review* sebagai sarana penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi penting untuk menilai efektivitas sistem hukum dalam mengakomodasi perubahan sosial dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, isu kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran telah menjadi perhatian utama dalam kajian hukum agraria dan perkawinan di Indonesia. Beberapa studi telah menyoroti aspek kekuatan hukum perjanjian pemisahan harta serta penerapan Pasal 21 ayat (3) UUPA yang membatasi kepemilikan tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran. Salah satunya yakni penelitian Ni Wayan Adiani dan Ninik Darmini (2016). Dalam penelitian yang berjudul “Implikasi Yuridis Harta Bersama Berupa Hak Milik atas Tanah sebagai Objek Pewarisan dalam Perkawinan Campuran”. Penelitian tersebut mengkaji faktor yang memungkinkan WNA mempunyai Hak Milik atas tanah dalam perkawinan campuran lebih dari satu tahun serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan aturan hukum yang berlaku. Studi kasus yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/PDT.P/2014/PA.Dps.

Secara umum, perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis. Penelitian terdahulu cenderung membahas implikasi hukum kepemilikan tanah dalam konteks pewarisan dalam perkawinan campuran, sementara penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum hak milik atas tanah untuk WNI dalam perkawinan campuran dan peran *judicial review* dalam penyelesaian sengketa.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih, baik dalam ranah teori maupun praktik, terkait analisis perlindungan hak milik atas tanah di Indonesia khususnya bagi pasangan ras campuran. Dengan berlandaskan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat jurnal hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Melalui Judicial Review.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah bagi WNI dalam konteks perkawinan campuran?
2. Sejauh mana *judicial review* dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah tersebut?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak konstitusional atas kepemilikan tanah bagi WNI yang menikah dengan WNA, serta menganalisis proses *judicial review* dalam menyelesaikan sengketa terkait hak atas tanah guna memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metodologi hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak tanah dalam perkawinan campuran di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber hukum, termasuk bahan hukum primer seperti UUPA dan UUP. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan meliputi buku serta jurnal yang membahas aspek hukum terkait, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan referensi tambahan lainnya. Metode analisis kualitatif diterapkan untuk mengkaji regulasi yang berlaku serta meneliti sejauh mana *judicial review* dapat berperan dalam memberi perlindungan atas hak konstitusional WNI dalam perkawinan campuran, sekaligus menjamin kepastian hukum dalam sistem agraria.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran

Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjalankan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaannya menjadi faktor utama dalam hampir setiap aspek kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, tanah bukan sekadar aset fisik, melainkan juga bagian dari sumber daya strategis yang harus dikelola dengan bijaksana.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan tanah dan sumber daya alam lain adalah tanggung jawab negara. Negara bertindak sebagai pengelola utama yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengatur, mengalokasikan, serta memanfaatkan tanah demi kesejahteraan bersama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanah tidak hanya dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga berkontribusi pada kepentingan nasional secara luas.³

Dalam konteks hukum pertanahan, hak milik atas tanah merupakan bentuk kepemilikan tertinggi yang memberikan keleluasaan penuh kepada pemiliknya. Dengan statusnya yang bersifat permanen dan dapat diwariskan, hak milik memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan jenis hak lainnya, seperti hak guna usaha atau hak pakai.⁴ Maka dari itu, sistem hukum harus memastikan bahwasanya hak milik atas tanah memperoleh perlindungan optimal agar pemiliknya

³ Abdul Mutalib Saranani, "Tinjauan Hukum tentang Pembuktian Sertifikat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, no. 3 (2023): 173-184

⁴ I Made Citra Gada Kumara, dkk., "Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, no. 3 (2021): 560-563.

tidak mengalami ketidakpastian hukum, baik akibat kebijakan negara yang berubah-ubah maupun potensi sengketa dengan pihak lain.

Permasalahan terkait kepemilikan hak atas tanah sering terjadi dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Menurut UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 21 ayat (1), hanya penduduk Indonesia yang diperbolehkan mempunyai tanah berstatus hak milik. Selanjutnya dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, apabila individu kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan mendapat tanah berstatus HGU, HGB, Hak Milik, atau Hak Milik Satuan Rumah Susun yang berdiri diatas tanah berstatus HGB, baik yang diperoleh melalui pembelian, penjualan, hibah, warisan, atau wasiat, tanah tersebut wajib dialihkan pada orang lain yang memenuhi syarat sebagai pemilik yang sah selama paling lama satu tahun.⁵ Apabila pengalihan tidak diselesaikan dalam periode tersebut, tanah tersebut secara langsung akan berada di bawah penguasaan negara.

Menurut konsep harta bersama yang tertera pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seluruh aset yang didapatkan selama pernikahan dianggap sebagai kepemilikan bersama. Namun, ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum bagi WNI, karena tanah yang didapatkan selama pernikahan berlangsung dapat dianggap sebagian milik pasangan WNA. Situasi ini tidak sesuai dengan Pasal 21 UUPA, yang secara eksplisit membatasi hak kepemilikan tanah hanya bagi WNI dan melarang WNA untuk memilikinya.

Masalah ini tercermin dalam sengketa yang melibatkan Ike Farida, seorang WNI yang menikahi WNA diluar negeri. Ike memilih untuk tinggal di Indonesia dan tetap mempertahankan kewarganegaraannya selama menikah, akan tetapi ia tidak membuat perjanjian pranikah. Sebelum mencatatkan pernikahannya, ia membeli sebuah unit apartemen bersertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak memproses sertifikat apartemen tersebut, dengan alasan bahwa status perkawinannya dengan WNA membuatnya tidak memenuhi kriteria pemegang hak. Kasus ini akhirnya diajukan ke PN Jakarta Timur, dengan Putusan No. 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim, yang memutuskan bahwa tanah atau properti yang didapat WNI selama berlangsungnya perkawinan campuran tanpa perjanjian pranikah mungkin tidak lagi diakui secara hukum. Jika tidak segera dialihkan sesuai peraturan yang berlaku, aset tersebut dapat jatuh ke tangan negara, sebagaimana telah ditentukan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Demi mendapat hak atas tanah yang dimilikinya, Ike Farida kemudian menguji materi UU Perkawinan (UUP) dan UU Pokok Agraria (UUPA) ke MK. MK kemudian mengeluarkan putusan dalam perkara No 69/PUU-XIII/2015 mengenai pasangan dalam perkawinan campuran, dimana MK memutuskan untuk mengizinkan perjanjian pranikah dibuat sesudah perkawinan terjadi, bukan hanya sebelum atau selama perkawinan. Selain itu, pejabat pencatat perkawinan harus segera meresmikan perjanjian tersebut.

Keputusan ini membawa perubahan penting dalam hukum perkawinan di Indonesia, terutama terkait peluang bagi pasangan dalam perkawinan campuran untuk memiliki tanah secara sah. Perubahan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya PP No. 103 Tahun 2015 terkait kepemilikan properti oleh WNA yang berdomisili di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia mengambil langkah untuk memberikan hak

⁵ Irma Devita Purnamasari, “Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris” (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 166.

⁶ Hukumonline, Pelaku Kawin Campur Gugat UU Agraria dan UU Perkawinan, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-kawin-campur-gugat-uu-agraria-dan-uu-perkawinan-lt55796036aaf55/>

yang setara kepada WNI yang menikah dengan WNA, serta memungkinkan untuk memiliki properti sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.

Dalam perkawinan campuran, umumnya pasangan hanya memperoleh hak pakai atau sewa atas tanah. Namun, jika ada perjanjian pranikah, pasangan yang tetap menjadi WNI tetap dapat mempertahankan kepemilikan tanah di Indonesia selama status kewarganegaraan tersebut dipertahankan.⁷ Perjanjian pranikah sendiri tergolong sebagai perjanjian formal yang membutuhkan persetujuan kedua pihak dan harus dibuat dengan mengikuti prosedur tertentu. Perjanjian ini harus memenuhi standar hukum umum dan dinyatakan dalam akta otentik agar dianggap sah.⁸

Melalui Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015, terjadi perubahan mendasar dalam regulasi terkait perjanjian pranikah yang tertera dalam UUPP serta Pasal 147 KUHP. Sebelumnya, ketentuan hukum membatasi pembuatan perjanjian pranikah hanya sebelum atau ketika berlangsungnya perkawinan. Namun, keputusan MK kini memungkinkan pembuatan perjanjian pranikah setelah perkawinan berjalan, dengan syarat perjanjian tersebut dicatatkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang agar sah secara hukum.⁹ Hal ini memberikan peluang bagi pasangan untuk mengatur keputusan dan tanggung jawab tiap pihak secara lebih fleksibel dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Perubahan ini juga berpengaruh pada pengaturan pembagian harta dalam perkawinan, khususnya dalam perkawinan campuran. Melalui perjanjian pasca-pernikahan, pasangan dapat menetapkan pembagian harta atau hak atas tanah dengan lebih terstruktur dan jelas, memisahkan antara harta pribadi dan harta bersama. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terkait hak atas tanah dan properti bagi pasangan dalam perkawinan campuran, yang membantu mereka mempertahankan dan hak-hak tersebut menurut hukum yang berlaku. Perjanjian tersebut memperkuat hak konstitusional warga negara Indonesia, khususnya terkait kepemilikan properti dalam konteks perkawinan campuran.

3.2 Peran *Judicial Review* dalam Menyelesaikan Sengketa Hak atas Tanah dalam Perkawinan Campuran

Sengketa hak atas tanah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan permasalahan struktural dalam sistem hukum agraria Indonesia. Para penggugat, yang umumnya terdiri dari pasangan dalam perkawinan campuran, sering kali mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa pembatasan hak kepemilikan tanah bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi yang dijamin dalam UUD 1945. Selain faktor regulasi dan kebijakan, aspek sumber daya manusia juga berkontribusi terhadap permasalahan agraria. Aparat pelaksana yang memiliki pemahaman terbatas tentang hukum pertanahan sering kali tidak mampu

⁷ Nadia Ardine, dkk, "Hak Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Orang Asing," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, no. 4 (2023): 274-285.

⁸ Wildaniyah Mufidatul A'yun dan Alif Hendra Hidayatullah, "Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan" *Jurnal Multikultural & Multireligius*, no. 1 (2023):22-47.

⁹ Ingrid Fransisca Matina Candra dan Zil Aidi, "Implikasi Atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 terhadap Perjanjian Perkawinan di Indonesia", *Unes Law Review*, no. 3 (2024): 8849-8859.

menyelesaikan sengketa dengan adil dan profesional, sehingga memperburuk konflik yang ada.¹⁰

Adapun *Judicial review* merupakan mekanisme pengujian terhadap undang-undang, baik dari sisi konstitusionalitas (*constitutional review*) maupun legalitas (*legality review*), untuk memastikan kesesuaian dengan aturan hukum yang memiliki hierarki lebih tinggi.¹¹ Proses ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai upaya menegakkan nilai-nilai yang tercantum dalam UUD 1945. Melalui *judicial review*, semua peraturan yang berlaku wajib mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UUD 1945. Selain menjamin kepatuhan terhadap norma hukum yang lebih tinggi, mekanisme ini juga berperan penting dalam memperkuat perlindungan HAM. Melalui *judicial review*, hak-hak konstitusional warga negara dapat dijaga dengan lebih maksimal serta ditegakkan secara merata sesuai prinsip keadilan.

Di Indonesia, mekanisme *judicial review* dijalankan sebagaimana Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwasanya “MK mempunyai otoritas untuk menilai apakah suatu undang-undang selaras dengan konstitusi”. Selain itu, Pasal 51 ayat (2) dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menggariskan bahwasanya individu atau pihak yang mengajukan permohonan wajib menguraikan secara detail bagaimana peraturan yang diuji berpotensi merugikan kepentingan hukumnya serta alasan mendasar yang menjadi dasar pengajuan uji materiil tersebut.¹² Hal ini memastikan bahwa yang mengajukan permohonan peninjauan kembali ialah pihak yang memiliki relevansi langsung dengan peraturan tersebut dan benar-benar merasa dirugikan oleh ketentuan yang dimaksud. Dengan demikian, prosedur pengujian ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dalam sistem hukum Indonesia, dengan memastikan bahwa setiap pengajuan *judicial review* sesuai dengan ketentuan konstitusional yang berlaku.

Namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan *judicial review* tidak secara penuh berada di tangan MK, karena Mahkamah Agung juga diberikan hak untuk melakukan pengujian hukum. Mekanisme peninjauan ini berfungsi sebagai untuk mengontrol peraturan perundang-undangan yang dinilai cacat, baik dalam aspek perumusan maupun substansi, terutama jika aturan tersebut berpotensi merugikan hak-hak warga negara.¹³

Adapun berdasarkan Peraturan MK No 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, prosedur pengajuan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi terdiri atas dua tahapan, yaitu:

1. Pengajuan Permohonan

Dalam jangka waktu maksimal empat puluh lima hari setelah peraturan tersebut resmi diberlakukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Perppu, permohonan pengujian secara resmi dapat diajukan baik secara daring maupun luring.

2. Persidangan

¹⁰ Desi Apriani dan Arifin Bur, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, no. 2 (2021): 220-239.

¹¹ Safi, “Sejarah dan Kedudukan Pengaturan *Judicial Review* di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum” (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), 72.

¹² Sunarto dan Eta Yuni Lestari, “*Judicial Review* Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Integralistik*, no. 1 (2024): 60-69.

¹³ M. Fadly Hasibuan dan Iza Rumesten, “Reorientasi Kewenangan *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, no. 2 (2023): 42-55.

Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu akan melakukan penilaian awal dalam dua tahap persidangan untuk melihat apakah materi permohonan sudah lengkap dan jelas sebelum mulai memeriksa pokok perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Pendahuluan

Persidangan ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek utama dari permohonan, meninjau kelengkapan dokumen yang diajukan, serta menguraikan secara rinci substansi permohonan. Hal-hal yang diperiksa dalam sidang ini mencakup data diri pemohon, otoritas Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara, legitimasi hukum pemohon (*legal standing*), landasan hukum yang mendasari permohonan (*posita*), serta tuntutan yang diajukan (*petitum*).

b. Pemeriksaan Perbaikan

Sidang berikutnya difokuskan pada evaluasi dan perbaikan permohonan, sekaligus pengesahan alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

1) Pada tahap awal pemeriksaan, dilakukan evaluasi terhadap inti permohonan yang diajukan, termasuk pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan materi yang diajukan. Hal ini meliputi data diri pemohon, otoritas Mahkamah Konstitusi, status hukum pemohon (*legal standing*), dasar argumentasi hukum permohonan (*posita*), serta gugatan atau tuntutan yang diajukan (*petitum*).

2) Selain itu, tahap awal juga mencakup pemeriksaan terhadap perbaikan permohonan yang sudah disampaikan dan validasi terhadap bukti yang diajukan oleh pemohon.

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan permohonan untuk memberikan bimbingan kepada pemohon tentang cara melengkapi atau memperbaiki permohonan. Proses pengujian berlangsung dalam sidang pleno yang bersifat terbuka untuk publik, dengan kehadiran 9 hakim konstitusi atau minimal 7 hakim sebagai syarat kuorum. Setelah pengujian selesai, para hakim konstitusi akan berkumpul untuk Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) guna mengambil keputusan. Apabila tidak dapat mencapai kata sepakat, maka cukup dengan suara terbanyak. Jika suara terbanyak belum dapat dicapai, maka keputusan akan ditentukan oleh suara ketua sidang pleno. Selanjutnya, putusan yang dihasilkan akan dilegalisir oleh hakim yang terlibat dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, serta oleh panitera. Putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum tetap setelah dibacakan dalam sidang pleno yang bersifat terbuka untuk publik.¹⁴

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran fundamental dalam memastikan bahwa kebijakan dan regulasi di Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang, MK berfungsi sebagai benteng terakhir dalam menjaga hak konstitusional warga negara. Dalam realitas hukum di Indonesia, beberapa regulasi kerap kali dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif, sehingga berpotensi merugikan warga negara tertentu.¹⁵ Misalnya, ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur kepemilikan tanah sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi WNI yang

¹⁴ Reza Ilham Maulana dan Yohanes Suwanto, "Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema Judicial Review," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 334-343.

¹⁵ Nety Hermawaty, dkk., "Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia", *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, no. 1 (2021): 12-25.

menikah dengan WNA. Sebagai lembaga yang berwenang meninjau konstitusionalitas suatu peraturan, MK memainkan peran sentral dalam mengoreksi aturan yang diskriminatif melalui mekanisme *judicial review*. Salah satu contohnya adalah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian pisah harta bagi pasangan dalam perkawinan campuran, sehingga WNI tetap dapat mempertahankan hak milik atas tanah mereka.

Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bagaimana *judicial review* dapat memperbaiki ketentuan hukum yang dinilai diskriminatif. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengubah ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya memberikan batasan pembuatan perjanjian pranikah hanya bisa dilaksanakan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Mahkamah Konstitusi, pembatasan ini bertentangan dengan hak fundamental WNI, khususnya hak atas kepemilikan dan penguasaan aset pribadi. Hak ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk memiliki harta pribadi, dan hak tersebut tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Menurut ketentuan dalam UUPA, kepemilikan tanah dengan status hak milik hanya diperuntukkan bagi WNI, sesuai dengan Pasal 21 ayat (1). Jika tidak ada perjanjian pranikah, aset yang didapatkan selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama, yang bisa memicu masalah dalam hukum agraria jika salah satu pasangan merupakan WNA.¹⁶ Untuk mengatasi hal ini, pengadilan memberikan izin bagi pasangan untuk menyusun perjanjian pemisahan harta, di mana tanah yang dimiliki oleh WNI tetap dianggap sebagai aset pribadi. Agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum, perjanjian harus didaftarkan di hadapan pihak yang berwenang, seperti pejabat pencatat perkawinan atau notaris, mengacu pada Pasal 29 ayat (1) dan (3) UUP, yang sudah mengalami penyesuaian melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Proses uji materiil ini menciptakan peluang untuk meningkatkan perlindungan atas kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran. Putusan MK membuka peluang bagi pasangan yang menikah beda kewarganegaraan untuk membuat perjanjian pranikah atau pascanikah secara sah. Ketentuan pemisahan aset dalam perjanjian ini merupakan instrumen penting untuk menjaga hak kepemilikan tanah masyarakat Indonesia.

Dampak uji materi terhadap kebijakan hukum menunjukkan efektivitasnya dalam memperkuat perlindungan hak atas tanah. Putusan Mahkamah Konstitusi telah melahirkan regulasi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Perkawinan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut, uji materi menjadi pijakan penting dalam pembaruan hukum yang lebih inklusif, memastikan perlindungan hak konstitusional WNI dalam perkawinan campuran serta menegaskan bahwa kepemilikan properti di Indonesia tetap terbatas bagi warga negara asing.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Sengketa kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran terjadi karena benturan antara ketentuan UUPA, yaitu pada pasal Pasal 21 ayat (1) yang membatasi kepemilikan

¹⁶ Kadek Ramdhana Wija Dharma, dkk., "Larangan Penguasaan Tanah oleh WNA Melalui Perjanjian Nominee," *Jurnal Konstruksi Hukum*, no. 2 (2022): 246-251.

tanah hanya untuk WNI dan konsep harta bersama dalam perkawinan. Ambiguitas hukum ini kemudian dikoreksi melalui proses *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, yang dalam Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas makna perjanjian pranikah agar dapat dibuat setelah pernikahan berlangsung. Putusan ini menjadi titik penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional WNI, khususnya atas tanah, sekaligus menunjukkan peran strategis *judicial review* dalam memperbaiki ketentuan hukum yang diskriminatif, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan keadilan bagi pasangan dalam perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, Yahya. *"Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974"* (Zahir Trading Co., 2015).
- Purnamasari, Irma Devita. *"Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris"* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).
- Safi', *"Sejarah dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum"* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).

Jurnal

- Robo, Sofianti Musa dkk. "Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, no. 1 (2021).
- Saranani, Abdul Mutalib. "Tinjauan Hukum tentang Pembuktian Sertifikat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, no. 3 (2023).
- Kumara, I Made Citra Gada dkk. "Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, no. 3 (2021).
- Ardine, Nadia dkk, "Hak Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Menikah Dengan Orang Asing," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, no. 4 (2023).
- Mufidatul A'yun, Wildaniyah, dan Alif Hendra Hidayatullah. "Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Multikultural & Multireligius*, no. 1 (2023).
- Candra, Ingrid Fransisca Matina, dan Zil Aidi. "Implikasi Atas Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 terhadap Perjanjian Perkawinan di Indonesia." *Unes Law Review*, no. 3 (2024).
- Apriani, Desi, dan Arifin Bur. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum*, no. 2 (2021).
- Sunarto, dan Eta Yuni Lestari. "Judicial Review sebagai Mekanisme Kontrol terhadap Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Integralistik*, no. 1 (2024).
- Hasibuan, M. Fadly, dan Iza Rumesten. "Reorientasi Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi." *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, no. 2 (2023).
- Maulana, Reza Ilham, dan Yohanes Suwanto. "Paradigma Yuristokrasi: Intervensi Yudisial atas Politik Melalui Mahkamah Konstitusi dengan Skema Judicial Review." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022).
- Hermawaty, Nety dkk. "Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia", *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, no. 1 (2021).

Dharma, Kadek Ramdhana Wija dkk. "Larangan Penguasaan Tanah oleh WNA Melalui Perjanjian Nominee," *Jurnal Konstruksi Hukum*, no. 2 (2022).

Internet

Hukumonline, 2015, "Pelaku Kawin Campur Gugat UU Agraria dan UU Perkawinan", URL: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-kawin-campur-gugat-uu-agraria-dan-uu-perkawinan-lt55796036aaf55/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing yang Berdomisili di Indonesia (PP 103 Tahun 2015).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.